

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 18 Februari 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 20	Selasa, 18 Februari 2020	Dana Kuota Hunian Bersubsidi Tak Habis April	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan optimistis bahwa dana kuota rumah subsidi tidak akan habis pada April mendatang seperti yang dikhawatirkan para pengembang.
2	Bisnis Indonesia Halaman 21	Selasa, 18 Februari 2020	Hutama Karya Siap Bangun Jembatan Semsel-Bangka jika Ditugaskan	Ada sejumlah usulan pembangunan jembatan bentang panjang antarpulau yang dilontarkan berbagai pihak. Usulan dimulai dari pembangunan jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau, hingga usulan tentang pembangunan jembatan lintas Provinsi Sumatra Selatan-Bangka
3	Kompas Halaman 16	Selasa, 18 Februari 2020	Rekayasa Jalur Tol dalam Pembahasan	Jalur Tol Purbaleunyi Km 118 yang terletak dekat longsor di Desa Sukatani, Kecamatan, Ngamprah, Bandung Barat, Masih bisa dilewati kendaraan. Rekayasa lalu lintas menjadi opsi untuk mengurangi beban jalan selama perbaikan lingkungan di lokasi itu.
4	Koran Tempo Halaman Metro 2	Selasa, 18 Februari 2020	Anies Dinilai Belum Berhasil Atasi Banjir dan Macet	Indo Barometer merilis survei keberhasilan Gubernur DKI Jakarta dalam Mengatasi masalah-masalah di Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional itu, Anies Baswedan dinilai belum berhasil mengatasi masalah banjir dan macet di Ibu Kota. Padahal dua isu tersebut dianggap menjadi masalah paling meresahkan masyarakat Jakarta.
5	Media Indonesia Halaman 9	Selasa, 18 Februari 2020	Kondisi di Km 118 Mirip Likuefaksi	Penanganan tanah longsor di pinggir Tol Purbaleunyi km 118 dilakukan dengan perbaikan saluran irigasi agar titik longsor tidak kembali mengalami rembesan.

Judul	Dana Kuota Hunian Bersubsidi Tak Habis April	Tanggal	Selasa, 18 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 20		
Resume	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan optimistis bahwa dana kuota rumah subsidi tidak akan habis pada April mendatang seperti yang dikhawatirkan para pengembang.		

| PEMBIAYAAN PERUMAHAN |

Dana Kuota Hunian Bersubsidi Tak Habis April

Bisnis, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan optimistis bahwa dana kuota rumah subsidi tidak akan habis pada April mendatang seperti yang dikhawatirkan para pengembang.

Pada tahun ini, pengembang takut kuota rumah subsidi, terutama untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digulirkan pemerintah habis pada April lantaran jumlahnya yang hanya cukup untuk 110.000 unit.

Namun, Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian PUPR Agusny Gunawan mengatakan bahwa sampai akhir pekan lalu, kuota FLPP yang terealisasi baru 414 unit melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera FLPP (SiKasep).

“Permintaan memang ba-

nyak, tapi belum tentu semuanya bisa terealisasi. Ini data *real time*, jadi pengembang harusnya tidak perlu khawatir kuota FLPP segera habis,” ungkapnya kepada *Bisnis*.

Berdasarkan aplikasi SiKasep, sudah 81.080 pendaftar KPR FLPP, 24.257 di antaranya belum mengajukan subsidi *checking*.

Adapun, 38.573 pemohon lulus subsidi *checking*, 797 orang tidak lulus, dan 15.579 masih dalam proses verifikasi oleh bank. “Kemudian yang cair baru 414 unit.”

Beberapa alasan pemohon tidak lulus, ujarnya, antara lain lantaran menggunakan KTP yang sudah pernah dipakai, atau sudah mempunyai cicilan lain. “Itu bisa tidak lolos subsidi *checking*.”

Pada perkembangan lain, PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk. menyebut telah mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah untuk menambahkan dana kuota rumah bersubsidi pada 2020. Harapannya, pemerintah bisa menambah kuota hingga dua kali lipat dari yang dianggarkan tahun ini.

Direktur Finance, Treasury & Strategy BTN Nixon L.P. Napitupulu pada Senin (17/2) mengatakan bahwa pembiayaan rumah subsidi harus tetap menggunakan anggaran pemerintah. Oleh karena itu, BTN hanya bisa memberi usulan untuk menambah kuota.

“Kami memang sedang dan akan menjajaki kemungkinan adanya kuota tambahan, membahas juga dengan industri perumahan agar [perumahan subsidi] juga bisa menjadi stimulus perekonomian,” ungkapnya. *(Mutiarra Nabila)*

Judul	Hutama Karya Siap Bangun Jembatan Semsel-Bangka jika Ditugaskan	Tanggal	Selasa, 18 Februari 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Ada sejumlah usulan pembangunan jembatan bentang panjang antarpulau yang dilontarkan berbagai pihak. Usulan dimulai dari pembangunan jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau, hingga usulan tentang pembangunan jembatan lintas Provinsi Sumatra Selatan-Bangka		

| PENGHUBUNG ANTARPULAU |

Hutama Karya Siap Bangun Jembatan Sumsel–Bangka jika Ditugaskan

Bisnis, JAKARTA — Ada sejumlah usulan pembangunan jembatan bentang panjang antarpulau yang dilontarkan berbagai pihak. Usulan dimulai dari pembangunan jembatan Batam—Bintan di Kepulauan Riau, hingga usulan tentang pembangunan jembatan lintas Provinsi Sumatra Selatan—Bangka.

Usulan itu diusung oleh anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dan sejumlah BUMN Karya.

Bambang meminta supaya PT Hutama Karya juga membangun jembatan Sumsel—Bangka. Dia beralasan, Hutama Karya sudah teruji membangun jaringan jalan tol Trans-Sumatra.

“Hutama Karya sudah [dan sedang] membangun 2.000 kilometer lebih dari Aceh sampai Lampung. Jembatan ini [Sumsel—Bangka] cuma 15 kilometer. Ini kira-kira bagaimana supaya Bangka Belitung bisa terbantu melalui jembatan ini,” ujarnya, Senin (17/2).

Namun, Hutama Karya belum bisa

memastikan apakah akan menggarap jembatan seperti yang diusulkan oleh anggota Komisi VI tersebut karena masih menunggu mandat dari pemerintah.

Corporate Secretary Hutama Karya Muhammad Fauzan menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima penugasan atau mandat untuk membangun proyek jembatan yang akan menghubungkan Sumatra Selatan dan Pulau Bangka itu.

“Kami belum bisa komentar banyak [soal usulan pembangunan jembatan Bangka—Sumsel]. Namun, kami siap jika mendapat penugasan dari pemerintah,” ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (17/2).

Rencana pembangunan jembatan yang melintasi Selat Bangka itu tersebut mendapat dukungan dari pemangku kepentingan di daerah tersebut.

Sebelumnya, Ketua Kadin Indonesia Sumsel Dodi Reza Alex mengatakan bahwa pembangunan jembatan penghubung tersebut akan mendongkrak perekonomian di kedua pulau.

“Kadin Sumsel sangat mendukung dan akan mendorong realisasi serta percepatan pembangunan jembatan penghubung dua pulau ini,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Rencana pembangunan jembatan sepanjang 13 kilometer tersebut akan dimulai dari Desa Tanjung Tapah, Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, jembatan akan tembus ke Bangka Tengah. Studi kelayakan pembangunan proyek tersebut rencananya dilaksanakan pada tahun ini.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang Sumsel Darma Budhy mengatakan bahwa pihaknya siap jika memang proyek senilai Rp15 triliun tersebut direalisasikan.

“Kami siap. Jadi, kami sudah membentuk tim kolaborasi antara Sumsel dan Bangka. Tim itu diketuai Kepala Bappeda masing-masing provinsi, unsur TNI, PU dan lainnya. Langkah awal tim gabungan untuk mempersiapkan FS [*feasibility study*] itu.” (*Aprianus Doni T*)

Judul	Rekayasa Jalur Tol dalam Pembahasan	Tanggal	Selasa, 18 Februari 2020
Media	Kompas Halaman 16		
Resume	Jalur Tol Purbaleunyi Km 118 yang terletak dekat longsor di Desa Sukatani, Kecamatan, Ngamprah, Bandung Barat, Masih bisa dilewati kendaraan. Rekayasa lalu lintas menjadi opsi untuk mengurangi beban jalan selama perbaikan lingkungan di lokasi itu.		

LONGSOR PURBALEUNYI

Rekayasa Jalur Tol dalam Pembahasan

BANDUNG BARAT, KOMPAS — Jalur Tol Purbaleunyi Km 118 yang terletak dekat longsor di Desa Sukatani, Kecamatan, Ngamprah, Bandung Barat, masih bisa dilewati kendaraan. Rekayasa lalu lintas menjadi opsi untuk mengurangi beban jalan selama perbaikan lingkungan di lokasi itu.

Sejauh ini, seperti disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat ada di lokasi terdampak, Senin (17/2/2020), jalur Tol Purbaleunyi Km 118 masih aman dilewati. Jalan belum terdampak longsor.

Namun, demi kelancaran perbaikan, Basuki merekomendasikan rekayasa arus lalu lintas. "Kami dengan Kakorlantas Polri (Kepala Korps Lalu Lintas) akan berkoordinasi. Nanti beliau yang menetapkan. Lebih cepat lebih baik," tuturnya.

Pergerakan tanah terjadi di dua sisi jalan, Selasa (11/2), baik dari Jakarta ke arah Bandung (Jalur B) maupun dari arah se-

baliknya (Jalur A). Di sisi jalur A, tampak genangan air seluas lebih dari 50 meter. Informasi dari PT Jasa Marga, genangan itu ada akibat longsor di area persawahan dan materinya menutupi terowongan saluran irigasi.

Di sisi lain, terdapat longsor seluas lebih dari 500 meter dengan posisi atas longsor berjarak kurang dari 10 meter dari bahu jalan. Setidaknya, longsor tanah itu merusak 10 rumah di Desa Sukatani dan menimbun lebih dari 3 hektar sawah warga.

Kementerian PUPR akan fokus pada pengerjaan di Jalur A sehingga saluran irigasi bisa berfungsi lagi. Itu untuk menghindari dampak susulan akibat terjadinya penumpukan air lagi jika terjadi hujan.

Selama pemantauan, Basuki menegur beberapa petugas dan meminta perbaikan dilakukan dengan perhitungan detail sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang. "Sementara

kami akan menangani yang di sana (Jalur A), mensketsa, dan menangani saluran irigasi dulu. Untuk sisi ini (Jalur B), kami bisa menggunakan terasering, bronjong, dan beberapa infrastruktur penahan tebing," tuturnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Komisaris Besar Eddy Djunaedi menuturkan, pihaknya menanti arahan dari Kakorlantas untuk rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi terdampak. Ia mengimbau warga untuk tidak memperlambat kecepatan karena melihat lokasi longsor.

"Jalur ini masih bisa dilalui dua arah tanpa hambatan. Namun, jika memang diperlukan rekayasa lalu lintas seperti mengubah rute untuk kendaraan besar, kami siap menyiasakan petugas," katanya.

Hingga Senin pukul 19.00, kondisi lalu lintas di jalan bebas hambatan itu tampak lancar. Pengendara terlihat menjaga kecepatan kendaraannya meng-

ikuti peringatan petugas dengan menggunakan bendera dan pencahayaan darurat.

Enam lokasi dipantau

Basuki menuturkan, sejak peristiwa longsor yang terjadi di Jembatan Cisomang dan Km 92, pihaknya melakukan pemantauan secara intensif di jalur-jalur rawan. Itu dilakukan untuk memastikan jalur lintasan ratusan kendaraan setiap hari itu tetap aman dilalui.

Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani menuturkan, pihaknya memantau setidaknya enam lokasi untuk mengantisipasi kejadian pergerakan tanah yang berdampak pada infrastruktur jalan. Keenam lokasi itu merupakan jembatan panjang yang akan berdampak besar jika terjadi pergerakan tanah.

"Sejauh ini semuanya normal. Kami terus mengamati enam lokasi tersebut dengan metode-metode yang ada," ujarnya. (RTG)

Judul	Anies Dinilai Belum Berhasil Atasi Banjir dan Macet	Tanggal	Selasa, 18 Februari 2020
Media	Koran Tempo Halaman Metro 2		
Resume	Indo Barometer merilis survei keberhasilan Gubernur DKI Jakarta dalam Mengatasi masalah-masalah di Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional itu, Anies Baswedan dinilai belum berhasil mengatasi masalah banjir dan macet di Ibu Kota. Padahal dua isu tersebut dianggap menjadi masalah paling meresahkan masyarakat Jakarta.		

METRO

Anies Dinilai Belum Berhasil Atasi Banjir dan Macet

Indo Barometer membandingkan Anies dengan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

EDISI, 18 FEBRUARI 2020



Banjir di Jalan Bungkal Raya, Jakarta Pusat, 21 Januari lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat

JAKARTA - Indo Barometer merilis survei keberhasilan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi masalah-masalah di Jakarta. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 1.200 responden secara nasional itu, Anies Baswedan dinilai belum berhasil mengatasi masalah banjir dan macet di Ibu Kota. Padahal dua isu tersebut dianggap menjadi masalah paling meresahkan masyarakat Jakarta.

Dalam survei itu, Anies dibandingkan dengan dua gubernur sebelumnya, yakni Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Gubernur Jakarta yang dianggap paling berhasil adalah Basuki Tjahaja Purnama," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Atlet Century, Senayan, Ahad lalu.

Survei Indo Barometer ini digelar pada 9-15 Januari lalu dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling, yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Tingkat margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Qodari, Ahok memiliki angka kesuksesan 42 persen, disusul oleh Joko Widodo dengan 25 persen. Sedangkan Anies Baswedan hanya mendapat porsi 4,1 persen. Begitu juga untuk masalah kemacetan, Ahok menduduki posisi pertama dengan 35,3 persen, Joko Widodo 25,3 persen, dan Anies Baswedan 8,3 persen.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani kemacetan banyak yang berkebalikan dengan Ahok. Bahkan tak jarang kebijakan Anies justru menjadi blunder.

Nirwono mencontohkan kebijakan Anies yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin sampai kawasan Monumen Nasional (Monas). Padahal, pada era Ahok, pemerintah Jakarta justru membatasi sepeda motor untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.

Selain itu, kata Nirwono, Anies membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan Ahok dalam penataan pedagang kaki lima di trotoar. Anies mengizinkan, sementara Ahok melarang. Padahal sebagian besar masyarakat berpendapat trotoar dibuat untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang.

Nirwono memberi apresiasi untuk kebijakan Anies yang membangun jalur sepeda. "Meskipun ini juga kelanjutan program yang sudah diinisiasi di era Pak Fauzi Bowo dan Pak Ahok," ucap dia.

Anies Baswedan enggan berkomentar ihwal hasil survei Indo Barometer tersebut. "Cukup ya," ujar Anies, kemarin. Ia memilih pergi daripada menjawab pertanyaan itu.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf mengatakan sudah bekerja maksimal untuk mengatasi banjir. Namun ia juga enggan mengomentari hasil survei. "Yang jelas, kami sudah bekerja maksimal," kata Juaini.

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat menjadi Gubernur Jakarta, semua kebijakannya mengikuti desain yang sudah ditetapkan sejak zaman Belanda. Begitu juga dalam mengatasi masalah banjir dan kemacetan. "Saya hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya, Pak Jokowi. Dan, siapa pun gubernurnya, bisa berhasil asalkan mengikuti desain yang dibuat para engineer," kata Ahok menanggapi hasil survei Indo Barometer. "DKI ini dari zaman Belanda sudah ada desainnya."

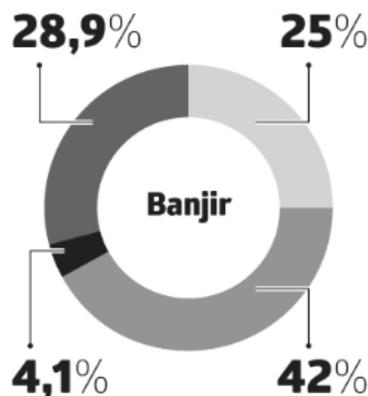
Ahok mencontohkan, untuk menangani banjir, Ibu Kota memiliki desain tanggul yang terhubung dengan 1.300 saluran air. "Sudah ada Kanal Banjir Barat, ada Cakung Drain; dan di timur ada Kanal Banjir Timur, yaitu Cengkareng Drain," katanya. "Jadi itu bukan ilmu saya. Itu ilmunya dari Belanda." **FRISKI RIANA | LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQ | INGE KLARA SAFITRI**

Unggul Versi Survei

INDO Barometer merilis survei tentang keberhasilan Gubernur DKI Jakarta dalam menangani sejumlah permasalahan Ibu Kota. Dalam pengumpulan data, survei ini menggunakan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Penilaian responden dibatasi hanya untuk Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Bas-

Aspek keberhasilan Gubernur DKI

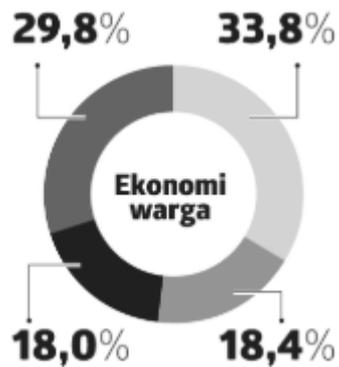
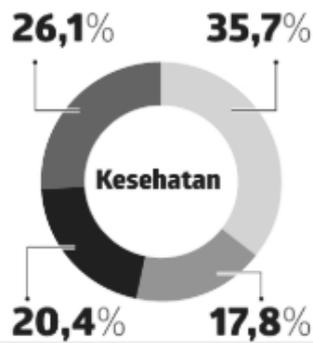
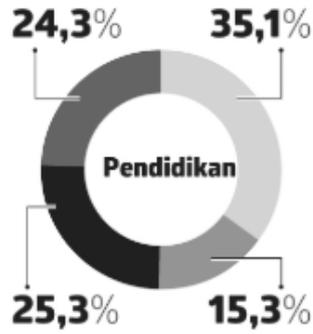
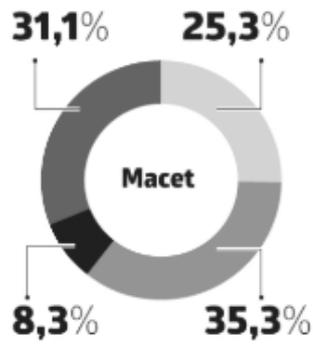
■ Jokowi ■ Ahok
■ Anies ■ Tidak Tahu



wedan.

Berikut ini hasilnya:

- **Jumlah responden:**
1.200 responden
- **Jumlah provinsi:**
34 provinsi
- **Margin of error:**
2,83 persen
- **Tingkat kepercayaan:**
95 persen
- **Metode:** *Multistage
random sampling*



Judul	Kondisi di Km 118 Mirip Likuefaksi	Tanggal	Selasa, 18 Februari 2020
Media	Media Indonesia Halaman 9		
Resume	Penanganan tanah longsor di pinggir Tol Purbaleunyi km 118 dilakukan dengan perbaikan saluran irigasi agar titik longsor tidak kembali mengalami rembesan.		

 BANDUNG, JAWA BARAT

Kondisi di Km 118 Mirip Likuefaksi

PENANGANAN tanah longsor di pinggir Tol Purbaleunyi Km 118 dilakukan dengan perbaikan saluran irigasi agar titik longsor tidak kembali mengalami rembesan.

Hal itu diungkapkan Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono, saat meninjau lokasi tanah longsor, kemarin.

“Ini seperti irigasi di Gumbasa, Palu, yang dulu terjadi likuefaksi atau pencairan tanah. Ini sama kayak likuefaksi, ada lumpur, jadi selanjutnya (tanah) itu dikeringkan supaya air mengalir,” terang Basuki.

Menurutnya, penanganan tanah longsor di pinggir Tol Purbaleunyi harus dilakukan dengan cara penguatan tebing. Jika tidak, longsor akan menarik badan jalan seperti yang dulu pernah terjadi di Km 92.

“Penguatan tebingnya itu bisa dengan terasering, kemudian diperkuat dengan beronjong. Itu sebagai penahan tebing di sini. Kalau untuk di

atas, saya minta sketsa desain untuk memperbaiki drainasenya dulu.”

Dia menerangkan penyebab tanah longsor karena terdapat genangan air di sawah dekat Tol Purbaleunyi arah Bandung sehingga menyebabkan air merembes ke tebing samping tol arah Jakarta.

“Tapi, ini penanganannya tidak terlalu rumit, hanya longsor kecil biasa,” urainya.

Basuki melanjutkan lokasi tanah longsor diibaratkan seperti lembah. Tanah longsor bisa terjadi karena dari lokasi di samping tol arah Bandung terdapat saluran irigasi yang tidak diberikan garis perkerasan.

“Sehingga filtrasinya merembes ke tanah, kemudian tanah menjadi jenuh hingga terjadi longsor di antara dua tebing. Tapi, ada *counter weight*-nya, kalau tidak, pasti longsor semua,” tukasnya.

Di kesempatan terpisah, pencarian

korban tertimbun tanah longsor di Desa Muara Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, terus dilanjutkan. Dari tiga korban, masih tersisa satu yang belum ditemukan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman, Ricky Riswandi, menerangkan tiga warga Jorong Pintuai, Nagari Muaro Sungai Lolo, menjadi korban akibat ladang rumah yang mereka huni ditimpa material tanah longsor.

Sementara itu, BPBD Pamekasan, Jawa Timur, terpaksa mengevakuasi pegawai pemkab setempat yang terjebak banjir, kemarin. Para pegawai yang tidak bisa keluar dari kompleks perkantoran akibat banjir dievakuasi menggunakan perahu karet.

Banjir yang menggenangi kawasan di sekitar kompleks perkantoran Pemkab Pamekasan di Jalan Jokotole terjadi akibat hujan deras selama beberapa jam.

Di Kabupaten Cirebon, sebanyak empat kecamatan tergenang banjir, yaitu Pasaleman, Pabedilan, Ciledug, dan Losari. Curah hujan tinggi menjadi salah satu penyebabnya. (DG/YH/MG/UL/AD/JI/DW/LD/BB/N-3)